

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak lagi bisa diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Jatmiko, 2006).

Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan Negara (www.ortax.org). Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sudah dipasang, terutama bagi usaha-

usaha kecil menengah tersebut tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati & Nurlis, 2012).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem self assessment yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Undang-undang tentang

perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Marni, 2012) .

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada 22 juta wajib pajak terdaftar tapi itu pun belum seluruhnya membayar pajak sesuai ketentuan. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman pajak supaya

kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait image negatif dengan orang-orang pajak yang saat ini meletak di masyarakat (Hatipah, 2013). Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sector pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Selama ini banyak wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah memiliki NPWP belum mau melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan baik. Kurangnya kemauan untuk memenuhi kewajiban tersebut antara lain disebabkan oleh asas perpajakan itu sendiri yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh pembayar pajak. Karena selama ini masyarakat belum melihat hasil yang signifikan dari penarikan pajak. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas

akan menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti apakah kemauan membayar pajak; pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan; serta manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak mempengaruhi untuk melaporkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan harapan kemauan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas semakin meningkat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Beberapa penelitian mengenai perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti seperti yang dilakukan Fikriningrum (2012), Arum (2012), Marni (2012), Rantung dan Priyono (2009) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor dominan lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya di kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (kp2kp) Wlingi”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak orang pribadi terhadap perpajakan.
2. Manfaat bagi Akademis sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dalam penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam melaporkan kewajiban pajaknya.
3. Manfaat Bagi pemerintah sebagai Regulasi dalam penulisan ilmiah ini dapat memberikan gambaran peraturan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.